

KEBIJAKAN POLITIK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIGI

Eko Mardiono, Darwis, Sastrio Mansur

ekomardiono974@gmail.com

Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

This research uses theory of Thompson and McEwen (2006), Bargaining (bargaining), Kooptasi (cooptation), and the Coalition (the coalition), it can be concluded that the bargaining factor development programs as a result of "reses" and "musrenbang" for political policy formulated budget year 2017 lasted "less good" that give impact on the lack of consistency of development programs that have been the aspiration of the community. Bargaining program development is alternative in result because of lack of funding a GRANT solution at the time. Then the factor cooptation and coalition are not integral part of the political policy formulation of the local budget (APBD) in 2017. Local Legislative (DPRD) and local government Sigi County each have run task and function based on the Act. It's just that accommodate various suggestion and aspiration into depth because of limited fund, the impact was less public confidence toward local government and local legislative Sigi County. This resulted in a lack of public trust in the Sigi regency in any budget formulation policy.

Keywords: *policy, politics, and budget*

PENDAHULUAN

Pada dasarnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berkaitan dengan penganggaran daerah yang dikenal dengan proses penyusunan rencana keuangan pendapatan dan pembiayaan, untuk kemudian dialokasikan ke masing-masing kegiatan berdasarkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Pada proses lahirnya APBD tersebut diketahui melibatkan dua unsur penyelenggara pemerintah daerah, antara lain DPRD dan Pemerintah Daerah. Olehnya APBD dalam prosesnya yang melibatkan lembaga politik hingga pada pengesahannya itu disebut sebagai kebijakan politik anggaran. APBD dalam pengesahannya melalui proses keputusan politik di DPRD dalam rapat paripurna DPRD. Dalam proses ini kemudian, disahkan menjadi Peraturan Daerah tentang kebijakan APBD tahun berjalan.

APBD merupakan anggaran program pembangunan daerah melalui proses perencanaan dalam menampung aspirasi masyarakat pada tingkat Desa dan Kelurahan yang disebut Musyawarah Rencana

Pembangunan (Musrembang) daerah. Oleh karena itu, proses inilah merupakan pelibatan public dari tingkat bawah hingga pada level Dinas terkait (Organisasi Perangkat Daerah), yang kemudian dibahan pada tingkat Komisi di DPRD dan selanjutnya masuk pada ranah proses politik, yaitu pembahasan anggaran melalui instrument politik yang disebut Badan Anggaran DPRD Kabupaten dan Kota.

Dalam pembahasan kebijakan politik anggaran APBD di Kabupaten Sigi tahun anggaran 2017 diketahui mengalami ketidaktepatan guna dan manfaat berdasarkan aspirasi masyarakat di tingkat Desa, dimana program pembangunan yang dirumuskan melalui Musrembang di setiap Desa dan kecamatan se Kabupaten Sigi, ternyata mengalami perubahan program pada pembahasan Dinas dan Badan Anggaran di DPRD sehingga hal ini menjadi problem krisis kepercayaan publik terhadap pembahasan APBD pada tahun 2017, seiring dengan proses perencanaan yang mengalami ketimpangan dengan tidak berdasar pada aspirasi masyarakat, sebagaimana terlihat pada proses politik

anggaran APBD tahun 2017, dimana beberapa program pembangunan dari Desa dan Kecamatan tidak terakomodatif, sebagaimana hasil dari proses Musrembang dan Reses Anggota DPRD pada setiap Daerah Pemilihan.

Dalam konteks kebijakan politik anggaran APBD kabupaten Sigi tahun 2017 yang kemudian mengorbankan aspirasi dan masukan masyarakat yang dihasilkan melalui reses dan musrembang terlihat bargaining program menjadi faktor penentu, sehingga rangkaian proses penyerapan aspirasi dari bawah seakan hanyalah sebagai seremonial saja guna melengkapi tuntutan prosedur perumusan kebijakan, parahnya hal itu berdampak besar pada kebijakan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. diketahui APBD tahun 2017 yang merupakan kebijakan politik anggaran yang diterapkan, didalamnya terdapat program-program pembangunan yang akan diimplementasikan, kebijakan anggaran tersebut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi dan dikontrol oleh DPRD Kabupaten Sigi.

Dengan terjadinya kebijakan politik anggaran dimana beberapa program pembangunan yang tidak mengakomodasi program yang telah menjadi rumusan Musrembang di Kabupaten Sigi kemudian berdampak pada lahirnya program pembangunan yang kurang memuaskan masyarakat setempat. Politik anggaran APBD tahun 2017, mestinya konsisten dalam rumusan dari aspirasi masyarakat hingga pada implementasi kebijakan anggaran APBD tahun 2017. Rakyat yang menjadi subjek pembangunan. Kepentingan kesejahteraan rakyat yang menjadi prioritas dalam pembahasan APBD tahun anggaran 2017 ketika itu. namun, pada kenyataannya banyak program usulan masyarakat Desa dan Kecamatan mengalami perubahan dan pergeseran atau diketahui tidak konsisten dari hasil Musrembang.

METODE

Penelitian kualitatif yang digunakan dalam Penelitian ini, menggunakan teori

Thompson dan McEwen (2006), *Bargaining* (tawar menawar), Kooptasi (*cooptation*), dan Koalisi (*coalition*) dalam menjelaskan masalah penelitian kebijakan politik anggaran APBD Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2017, dengan data yang dikumpulkan melalui Observasi (pengamatan) Interview (wawancara), Kuesioner (angket), dan dokumen yang relevan. data yang telah mendapat pengakuan keakuratan dan validitasnya kemudian dilakukan kategorisasi yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan selanjutnya dilakukan interpretasi makna data dengan menafsirkan makna yang terkandung dalam data atas jawaban informan hingga sampai pada rumusan kesimpulan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mempergunakan teori Thompson dan McEwen (2006), *Bargaining* (tawar menawar), Kooptasi (*cooptation*), dan Koalisi (*coalition*) dalam menjelaskan masalah kebijakan politik anggaran APBD Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2017. Dalam kebijakan politik anggaran APBD Kabupaten Sigi pada tahun 2017 merupakan hasil garapan dari kedua lembaga yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi yang diwakili Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan pihak DPRD sebagai lembaga politik diwakili oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sigi. proses politik anggaran di kedua lembaga penyelenggara pemerintahan daerah tersebut kemudian disahkan oleh Bupati Sigi bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Sigi dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sigi tahun 2017.

Faktor *Bargaining*

Pada perumusan kebijakan APBD kabupaten sigi oleh DPRD Kabupaten Sigi melalui Badan Anggaran bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi sebagaimana amanah Undang-undang Pemerintahan Daerah nomor 23 tahun 2014 yang keduanya merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah diketahui bahwa faktor *Bargaining* menjadi penentu.

dalam konteks pembahasan program pembangunan yang menjadi pokok pembahasan, hal ini dikarenakan *bargaining* berkaitan erat dengan skala prioritas pembangunan Kabupaten Sigi yang diperhadapkan pada sebuah kondisi keterbatasan dana pembangunan, meskipun disadari bahwa hasil rese DPRD Kabupaten Sigi yang menampung aspirasi masyarakat berdasarkan daerah pemilihannya serta Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi yang penampungan aspirasi dari masyarakat melalui Musrembang Desa dan Kecamatan akan terabaikan dengan menyesuaikan ketersediaan dana, hal itu dikuatkan pada pendapat wakil rakyat di DPRD kabupaten sigi yang menganggap rumusan musrembang dari masyarakat desa dan aspirasi reses tidak terakomodasi karena keterbatasan dana pembangunan sehingga *bargaining* DPRD dengan Pemerintah Daerah melalui skala prioritas seakan menjadi jalan tengah dengan tetap mengutamakan program penting yang dapat menunjang kesejahteraan rakyat di Kabupaten Sigi terlahir bahwa struktur anggaran kita masih banyak pembiayaan masuk ke gaji pegawai dan guru, olehnya atas sebuah kondisi keterbatasan anggaran pembangunan maka dibutuhkan tingkat kreatifitas pemerintah dan DPRD Kabupaten Sigi dalam menggali sumber asli daerah.

Bargaining program diakui sebagai salah satu solutif dalam kebijakan politik anggaran APBD Kabupaten Sigi pada tahun 2017, sebagai jalan keluar dalam rangka menanggulangi terjadinya ketidakefektifan program pembangunan di daerah itu, sehingga sebisa mungkin aspirasi masyarakat kabupaten sigi yang kadang tidak terakomodasi dapat ditekan, hal ini dikarenakan dapat melunturkan kepercayaan publik, sebagaimana yang dirasakan oleh sebagian besar tokoh-tokoh masyarakat Kabupaten Sigi, yang menilai bahwa hal itu merupakan kendala pemerintah daerah dalam merumuskan program pembangunan, meskipun sebagian masyarakat sebenarnya menyadari hal itu sebagai hal yang dirasakan di semua daerah di Indonesia, banyak

program yang diusulkan oleh masyarakat, tapi tidak terakomodasi semuanya karena anggaran terbatas.

Masyarakat yang memahaminya menganggap hal ini sebagai masalah biasa dan semua daerah alaminya karena dana pembangunan terbatas, aspirasi masyarakat yang begitu banyak kemudian menuntut DPRD Kabupaten Sigi bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi untuk melakukan *bargaining* program pembanguan yang menjadi skala prioritas pembangunan, sehingga pada konteks ini perlu dipahami masyarakat secara keseluruhan agar modfikasi program dengan skala prioritas yang telah dilakukan pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Sigi secara maskrimal tidak melahirkan kekecewaan mendalam masyarakat dalam setiap proses “reses” dan “musrembang”

Oleh karena itu pemerintah daerah kabupaten Sigi dan DPRD kabupaten Sigi ini dianggap perlu melakukan sosialisasi intensif sebagai upaya untuk memberikan pengertian kepada masyarakat. Meskipun reses dan musrembang penting, tetapi pemahaman keterbatasan dana atau anggaran tahun 2017, membuat program pembangunan cukup terbatas, pada posisi ini yang penting danbermanfaat dengan baik berdasarkan program pembangunan yang meningkatkan kualitas kesejahteraan rakyat. Dengan demikian bahwa DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi sudah bekerja dengan baik dan maksimal. Hanya saja dana terbatas untuk membiayai program pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat Kabupaten Sigi. Sehingga dalam rangka pembangunan dilakukan bertahap. pembangunan infrastruktur yang telah direalisasikan menjadi jawaban atas kesinambungan program pembangunan, sekaligus menunjukkan adanya upaya memaksimalkan anggaran dana Pembangunan berdasarkan skala prioritas

Memang menjadi kenyataan bahwa masih terdapat beberapa desa yang belum mendapatkan program pembangunan maksimal karena keterbatasan anggaran pembangunan.

Meskipun demikian upaya pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Sigi cukup maksimal. Oleh karena itu, faktor bargaining program pembangunan yang menjadi agenda penting dan strategis dalam mencari solusi. Desa-desa yang terdapat di kecamatan Kulawi dan kecamatan yang terpencil seperti desa Pipikoro relative menjadi perhatian pemerintah dan DPRD setiap tahun anggaran. Hanya pada tahun anggaran 2017 mengalami keterbatasan dana sehingga skala prioritas pembangunan yang menjadi “bargaining” program dengan DPRD sehingga hasil “reses” dan “Musrembang” yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah Sigi dapat terakomodasi berdasarkan aspirasi dan tuntutan masyarakat, sebagaimana hal itu dikuatkan oleh pandangan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sigi yang menyatakan bahwa faktor bargaining program cukup penting dalam menyelesaikan masalah pembangunan, karena dua sisi yang memiliki peran dan fungsi dalam sistem pemerintahan kita di daerah ini, yaitu DPRD Kabupaten Sigi melalui “reses” dan Pemerintahan Daerah Sigi melalui “Musrembang” semuanya itu bermuara pada kepentingan masyarakat. Bila ini bersinergi maka melahirkan hasil pembangunan yang tepat dan bermanfaat karena berdasarkan aspirasi masyarakat di setiap dapil dan desa.

Diketahui bahwa dengan *bargaining* program pembangunan itu dapat mempertemukan kedua kepentingan antara Pemerintah Daerah dan kepentingan DPRD sehingga hasil pembangunan itu dapat bermanfaat dan tepat guna bagi masyarakat daerah tersebut, di kabupaten Sigi misalnya yang merupakan daerah yang baru dimekarkan (terbentuk menjadi daerah otonomi baru) tentu saja masih banyak yang harus dirintis. Salah satu faktor yang menguntungkan adalah masih banyak lahan kosong yang harus dibangun berdasarkan prioritas kepentingan masyarakat, masyarakat kabupaten sigi menyadari bahwa untuk merintis daerah yang baru terbentuk harusnya Pemerintah Pusat mengucurkan dana bantuan pembangunan lebih banyak dan proporsional, karena jika dana terbatas maka

pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Sigi dalam memenuhi aspirasi rakyatnya juga sangat terbatas sehingga pada kondisi ini selalu saja menuntut pada hal program pembangunan dengan skala prioritas melalui bargaining.

Bargaining program pembangunan daerah merupakan hal yang positif karena mensinergikan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dan DPRD. Di Kabupaten Sigi tingkat sinergitas kedua lembaga tersebut menjadi kebutuhan dalam menafatkan dana anggaran APBD tahun 2017 dapat tepat guna berdasarkan skala prioritas yang dikehendaki oleh masyarakat daerah ini, sehingga memberikan penjelasan kepada masyarakat di Desa untuk memahami keterbatasan dana anggaran itu merupakan hal penting terutama meminimalisir tuntutan realisasi atas hasil reses dan musrembang yang telah digelar sebelumnya..

Masyarakat harus memahami bahwa tidak semua terakomodasi karena adanya keterbatasan dana anggaran. Sehingga persoalan dilematis ini dapat teratasi karena pada dasarnya disini lain ingin memberikan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat desa, tetapi anggaran yang diporsikan dari Pemerintah Pusat cukup terbatas. Dengan pemahaman ini yang tadinya masyarakat Desa menyurutinya akan berubah menjadi sikap kesadaran atas situasi yang terjadi bahwa pemerintahan daerah ingin sekali memenuhi kebutuhan program yang diusulkan oleh masyarakat, namun harus membaginya sesuai dengan asas keadilan dan proporsionalitas. Pada satu sisi “hasil reses, DPRD Kabupaten Sigi harus dipenuhi karena hal itu penting karena berdasarkan aspirasi masyarakat sehingga atas itu diusahakan upaya pencarian titik temu antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam membahas politik anggaran APBD tahun 2017 lalu dengan prinsip utamanya harus proporsional berdasarkan kebutuhan dana.

Dalam proses politik anggaran APBD tahun 2017 sebetulnya telah berlangsung dengan baik. Hal ini karena mengakomodasi kedua proses perumusan program pembangunan baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten Sigi maupun oleh DPRD Kabupaten Sigi. Hanya saja, harapan besar rakyat dapat terakomodasi hasil “reses” dan “musrembang” dapat terakomodasi dengan maksimal, tetapi anggaran cukup terbatas. Dalam konteks ini kemudian menjadi problem karena dapat mengecewakan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi tentang proses, tahapan, dan makna dari kebijakan politik anggaran di Kabupaten Sigi pada setiap pembahasan APBD tahun anggaran.

Proses kebijakan politik anggaran APBD tahun 2017 sebetulnya merupakan hasil kerja dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi dan DPRD Kabupaten Sigi dalam merumuskan kebijakan anggaran APBD. APBD tahun anggaran 2017 ditetapkan sebagai hasil dari sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sigi. Lalu sebelumnya mendengarkan sikap akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sigi. Setelah itu, disahkan bersama Bupati Kabupaten Sigi dan Ketua DPRD Kabupaten Sigi menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang APBD tahun anggaran 2017. Sebagaimana pemahaman DPRD kabupaten sigi bahwa APBD merupakan proses politik yang disahkan oleh Bupati dan Ketua DPRD yang sebelumnya telah mengami proses perumusan program pembangunan, yaitu melalui reses yang dilakukan oleh DPRD Sigi dan musrembang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Sigi. Dalam proses ini kemudian diajukan masing-masing tim anggaran APBD di DPRD namanya Badan Anggaran. Setelah itu, maka dibahas bersama antara eksekutif dan legislative dan diajukan ke Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sigi. Setelah itu dilakukan sikap akhir fraksi-fraksi sebagai perpanjangan tangan Partai Politik di DPRD, maka disahkan oleh Bupati dan Ketua DPRD Sigi. Untuk itu, APBD tahun anggaran 2017 disebut sebagai kebijakan politik anggaran APBD Kabupaten Sigi. Dengan demikian melahirkan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang APBD Tahun 2017.

Oleh karena itu, APBD tahun 2017 merupakan hasil kebijakan politik anggaran Kabupaten Sigi sulit untuk dilepaskan peran

strategis dan penting oleh DPRD Kabupaten Sigi. DPRD sebagai lembaga politik, segala kebijakan harus dibahas disahkan di DPRD Kabupaten Sigi termasuk kebijakan politik anggaran tersebut menjadi Peraturan Daerah tentang APBD tahun 2017. Oleh karena itu, dalam pembahasan kebijakan politik anggaran APBD tahun 2017 ini, faktor bargaining cukup penting dalam menentukan skala prioritas program pembangunan. Hal ini merupakan rumusan kebijakan dari kedua lembaga pemerintah daerah itu (Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi dan DPRD Kabupaten Sigi). Hanya saja, memang cukup mengecewakan masyarakat yang menggantungkan harapannya yang cukup tinggi. Harapan itu memang baik dan konstruktif, tetapi keterbatasan dana APBD.

Kooptasi (*cooptation*)

Faktor lain yang menjadi unsur analisis dalam tesis ini adalah Kooptasi (*cooptation*). Kooptasi adalah masuknya atau diterimanya unsur-unsur baru pada kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam organisasi melalui suatu proses sebagai upaya menjaga kestabilan. Dalam konteks ini, unsur kerjasama antar partai politik atau negosiasi fraksi di dalam lingkungan internal DPRD dan Pemerintah Daerah memengaruhi kebijakan public, yaitu kebijakan politik anggaran APBD Kabupaten Sigi. Kooptasi antar fraksi dalam memformulasikan kebijakan politik anggaran untuk menjadi Peraturan Daerah tentang APBD tahun 2017 Kabupaten Sigi memerlukan formulasi kebijakan yang stabil, sehingga ada persamaan Visi dan Misi antara DPRD Kabupaten Sigi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi dalam memanfaatkan APBD Kabupaten Sigi secara baik dan bermanfaat.

Faktor kooptasi antar fraksi yang mewakili partai politik di dalam DPRD Kabupaten Sigi merupakan hal seharusnya untuk menciptakan stabilitas pembangunan daerah, terutama dalam penyusunan program-program pembangunan. Oleh karena itu, Bupati Kabupaten Sigi sebagai mantan birokrasi dan berkiprah dalam politik praktis tentu saja

memiliki akses politik anggaran dalam memformulasi program pembangunan Kabupaten Sigi kini dan akan datang. Kemampuan Bupati melakukan kooptasi dalam proses perumusan kebijakan public politik anggaran APBD 2017 sangat menentukan dalam membangun stabilitas pembangunan daerah ini. Demikian pulan didukung kekuatan politik kooptasi dalam DPRD Kabupaten Sigi yang diwakili kekuatan fraksi melakukan musyawarah mufakat dalam merumuskan program pembangunan Kabupaten Sigi.

Perumusan kebijakan politik anggaran APBD di Kabupaten Sigi pada tahun 2017 lalu memang memerlukan faktor kooptasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi, sehingga perumusan kebijakan public (program) pembangunan yang akan dibiayai pada saat memerlukan adanya kesamaan persepsi dan Visi dan Misi sehingga Pembangunan Kabupaten Sigi kini dan akan datang, sehingga faktor kooptasi memang perlu dalam mempersamakan persepsi terkait dengan program-program pembangunan yang akan dibiayai oleh APBD 2017

Faktor kooptasi dalam perumusan kebijakan politik anggaran APBD tahun 2017 ternyata cukup strategis karena melibatkan Fraksi sebagai wakil Partai Politik. Oleh karena itu, Bupati hendaknya memiliki peran penting dalam mengendalikan Fraksinya di DPRD Kabupaten Sigi, sehingga program-program pembangunan yang telah dirumuskan dapat berjalan dengan baik. Hal ini penulis lihat bahwa Bupati Sigi selama ini cukup baik dan mampu memainkan peran pentingnya dalam merumuskan kebijakan pembangunan (program) yang betul-betul bermanfaat bagi rakyat di Kabupaten Sigi.

Kooptasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi selama tahun 2017 berjalan dengan baik, sehingga program pembangunan bermanfaat secara tepat guna. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi selama ini memanfaatkan APBD secara baik dan tepat guna sebagai hasil dari sinergitas DPRD Kabupaten Sigi dalam merumuskan

kebijakan politik anggaran APBD Kabupaten Sigi 2017.

Pada konteks ini bahwa peran Bupati Sigi cukup baik dan maksimal untuk memikirkan kesejahteraan rakyatnya, kerjasama dengan DPRD Kabupaten Sigi terutama dalam merumuskan kebijakan politik anggaran APBD tahun 2017 namun problemnya dana pembangunan kita ini cukup terbatas menjadi permasalahan, ditambah lagi dengan APBD tahun 2017 lebih banyak untuk pembiayaan Pegawai Negeri Sipil (ASN), sehingga sebagai upaya menutup celah itu menuntu perlunya ditingkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah kita di Kabupaten Sigi

Dalam kebijakan politik anggaran APBD tahun 2017 Kabupaten Sigi peran DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi dalam melakukan pemilahan program-program pembangunan termasuk cukup mendongrat kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi. Oleh karena itu sinergitas antara DPRD Kabupaten Sigi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi memberikan hasil yang positif.

Dalam perumusan program pembangunan amat diperlukan faktor kooptasi antara DPRD Kabupaten Sigi melalui unsur Fraksi dalam memberikan respons positif terhadap kemampuan kinerja Pemerintah Daerah dalam merumuskan program pembangunan sebagai hasil dari “Musrebang” pembangunan yang dimulai dari Desa, kecamatan hingga tingkat Kabupaten. Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi memerlukan dukungan politik anggaran APBD Kabupaten Sigi 2017. Hal ini sesungguhnya, dengan faktor kooptasi ini sehingga anggaran APBD tahun 2017 berjalan dengan baik tanpa ada masalah.

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sigi berdasarkan APBD tahun 2017 cukup baik dan termanfaatkan dana berdasarkan peruntukannya, yaitu program pembangunan yang telah di Paripurnakan di DPRD Kabupaten Sigi saat itu, dimana terlihat bahwa DPRD Kabupaten Sigi melalui pandangan sikap akhir Fraksi yang mewakili Partai Politik memberikan respons positif, sehingga faktor kooptasi

berjalan dengan maksimal. Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi secara cermat dan bijak, telah memanfaatkan dana pembangunan APBD tahun 2017 secara efektif berdasarkan peruntukannya yang telah diatur dalam Peraturan Daerah kebijakan politik anggaran.

Dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 bahwa DPRD dan Pemerintah Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah. Oleh karena itu, faktor kooptasi dalam kebijakan politik anggaran APBD tahun 2017 menjadi pijakan sehingga hasil dari rumusan program pembangunan itu menjadi tepat guna. Faktor kooptasi dalam perumusan kebijakan politik anggaran APBD Kabupaten Sigi sangat diperlukan dalam mentabilisasi situasi dan kondisi keuangan daerah.

DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi dalam proses perumusan kebijakan politik anggaran APBD 2017 Kabupaten Sigi cukup berjalan dengan baik. Hal ini sejak awal DPRD dan Pemerintah Daerah memiliki komitmen bersama melahirkan program pembangunan yang bermanfaat dan bertujuan meningkatkan kualitas kesejahteraan rakyat Kabupaten Sigi kini dan akan datang. Meskipun diketahui bahwa kebijakan politik anggaran APBD tahun 2017 masih banyak program pembangunan di desa-desa ini terutama di kecamatan Gimpu ini belum terealisasi. Hal ini karena keterbatasan dana pembiayaan pembangunan dalam APBD tahun 2017 belum mengakomodasi program-program pembangunan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam “reses” anggota DPRD Kabupaten Sigi, dan hasil “musrembang” dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi. cukup baik dan penting dan strategis. Dalam perumusan kebijakan politik anggaran APBD tahun 2017 telah berlangsung secara prosedural tetapi tidak substansial karena masih banyak jalan-jalan dan jembatan serta sekolah yang belum diperbaiki padahal ini semua menjadi kebutuhan mendasar rakyat.

Dalam konteks “reses” dan “musrembang” yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Sigi dan DPRD

Kabupaten Sigi setiap perumusan kebijakan politik anggaran APBD tahun 2017 memberikan harapan besar kepada masyarakat di desa-desa dan kecamatan. Meskipun unsur *kooptasi* yang dilakukan DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi dalam mengatasi program pembangunan yang lebih aspiratif. Meskipun demikian, program pembangunan harus dilakukan secara skala prioritas dan proporsional berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat. Hampir semua desa dan kecamatan di Kabupaten Sigi memiliki perbedaan karakteristik sehingga membutuhkan kebijakan politik anggaran APBD tahun 2017 yang lebih realistis dan rasional. Namun demikian, penulis beranggapan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi dan DPRD Kabupaten Sigi telah menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Koalisi (*coalition*)

Koalisi (*coalition*), merupakan interaksi melalui kombinasi antara dua organisasi atau lebih karena memiliki tujuan bersama. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa DPRD dan Pemerintah Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Jadi, DPRD dan Pemerintah Daerah hendaknya melakukan kerjasama dalam mencapai tujuan pembangunan daerah yaitu mensejahterakan masyarakat daerah tersebut. Koalisi (*coalition*) dalam penelitian ini menjelaskan bahwa DPRD Kabupaten Sigi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi dalam pembahasan kebijakan politik anggaran APBD tahun 2017 merupakan hasil kerjasama kelembagaan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, faktor koalisi antara DPRD dan Pemerintah daerah kabupaten Sigi dalam pembahasan kebijakan politik anggaran APBD Kabupaten Sigi tahun 2017 merupakan perintah Undang-Undang. Hal itulah sehingga koalisi kedua lembaga penyelenggara pemerintahan daerah itu hendaknya bersinergi dalam meramu program-program pembangunan daerah Kabupaten Sigi kini dan akan datang.

Di kabupaten sigi diketahui bahwa tokoh masyarakat menilai kinerja DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi ketika pembahasan kebijakan politik anggaran APBD tahun 2017 Kabupaten Sigi telah mencerminkan yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. pembahasan kebijakan politik anggaran di DPRD Kabupaten Sigi yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut cukup baik. bahwa Pemerintah Daerah yang dipimpin bupati, program-program pembangunan telah maksimal untuk menampung aspirasi masyarakat desa dan kecamatan. kerjasama antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi dalam perumusan kebijakan politik anggaran APBD tahun 2017 silam cukup baik. Meskipun ada beberapa yang harus dibenahi,

Kerjasama DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi dalam pembahasan kebijakan politik anggaran APBD tahun 2017 merupakan perintah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Hal inilah menunjukkan bahwa faktor koalisi (*coalition*) kedua lembaga penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sigi mau tak mau harus melakukan fungsi-fungsi dan kewenangan dalam membahas anggaran politik baik di Pemerintahan Daerah Sigi maupun di DPRD Kabupaten Sigi melalui alat kelengkapan dewan, yaitu Badan Anggaran.

Faktor koalisi (*coalition*) dalam pembahasan kebijakan politik anggaran APBD tahun 2017 merupakan keharusan karena tanpa adanya koalisi dalam pembahasan kebijakan politik anggaran APBD pada tahun 2017 itu, maka dapat dikatakan menyalahi Undang-undang. DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi merupakan kewenangan yuridis yang harus dijalankan masing-masing kedua lembaga tersebut berdasarkan tugas dan fungsinya.

Fungsi dan tugas anggota DPRD Kabupaten Sigi dalam menjalankan pembahasan Anggaran APBD tahun 2017 sebagai produk kebijakan politik anggaran yang dibahas bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten

Sigi dan DPRD Kabupaten Sigi yang kemudian disahkan dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sigi, tugas dan kewenangan DPRD Kabupaten Sigi melalui alat kelengkapan dewan, yaitu Badan Anggaran memiliki kewenangan dalam membahas APBD tahun 2017. Demikian pula, Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi melalui Tim Anggaran Daerahnya juga melakukan perumusan anggaran daerah yang disebut APBD., disinilah letaknya sehingga DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi berkoalisi dalam membahas APBD. Oleh karena itu, berdasarkan prosesnya itulah sehingga disebut sebagai kebijakan politik anggaran APBD Kabupaten Sigi 2017, dan seterusnya. Sinergitas antara kedua lembaga tersebut dalam pembahasan politik anggaran APBD selanjutnya dapat lebih baik dan positif.

Kewenangan tugas dan fungsi pembahasan kebijakan politik anggaran APBD merupakan hasil koalisi antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi yang kemudian disahkan di Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sigi. Pada sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sigi yang dihadiri pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi, kemudian parak fraksi di dewan memberikan sikap akhirnya terkait APBD tahun 2017 itu. Hal inilah menunjukkan bahwa APBD tahun 2017 merupakan proses politik anggaran yang kemudian menjadi kebijakan politik anggaran tahun 2017.

Pelibatan Fraksi sebagai wakil dan perpanjangan partai politik dalam proses politik anggaran membuat kebijakan politik anggaran. Hal inilah bahwa politik anggaran menjadi kebijakan APBD tahun 2017 menjadi Peraturan Daerah yang disahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sigi menyangkut anggaran daerah yang termuat di dalamnya program-program pembangunan yang telah dirumuskan bersama melalui "*reses*" dan "*musrembang*". DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi telah memberikan rumusan kebijakan dan program pembangunan sebagai hasil dari Musrembang. Demikian pula DPRD Kabupaten

Sigi juga melahirkan program pembangunan melalui proses “reses”.

Tokoh masyarakat kecamatan Kulawi yang banyak terlibat dalam penyusunan program pembangunan daerah Kabupaten Sigi baik berupa “reses” yang dilakukan oleh pihak DPRD Kabupaten Sigi maupun kegiatan “musrembang” yang dirayakan oleh pihak pemerintah daerah kabupaten Sigi. kedua kegiatan ini sebetulnya cukup bagus bila diterapkan dan direalisasikan dengan jelas dan konsiten. Namun, kadangkala program yang diaspirasikan masyarakat tetapi pada pembahasan tingkat Badan Anggaran dan SKPD bersangkutan tidak terakomodasi lagi, namun pada prinsipnya cukup bagus karena wakil rakyat kita perdadipil turun ke lokasi untuk mendengar dan menampung aspirasi rakyatnya. Demikian pula, pemerintah daerah mendengar dan melihat langsung dan mendapatkan saran dan masukan dari masyarakat. Karena masyarakat yang tahu dan merasakan langsung dampak pembangunan,

Koalisi (*coalition*) merupakan faktor penting dan strategis Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Sigi dalam merumuskan kebijakan politik Anggaran untuk membiayai program-program pembangunan daerah. Koalisi antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi dapat melahirkan program pembangunan yang baik dan bermanfaat tepat guna bagi kesejahteraan rakyatnya. Dalam kondisi demikian ini, kedua lembaga tersebut melakukan *sharing* dalam proses perumusan program pembangunan yang baik dan tepat guna. Tahapan perumusan program pembangunan yang dibiayai oleh APBD tahun 2017 silam merupakan program yang pembangunan yang tepat guna dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Kabupaten Sigi.

Kabupaten Sigi yang baru saja memulai derap langkah pembangunannya di segala bidang kerap kali menemukan berbagai hambatan, terutama keterbatasan dana APBN dari Pusat. Kabupaten Sigi yang telah banyak membangun infrastruktur jalanan dan jembatan serta bangunan kantor yang menjadi sarana

pelayana administrasi memerlukan sinergitas antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Sigi. Sinergitas ini dalam model “koalisi” dalam membangun persepsi dan visi pembangunan dalam memajukan pembangunan yang mengarah peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sigi.

Kabupaten Sigi beberapa tahun terakhir ini telah mengalami kemajuan pembangunan fisik dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Pembangunan Sekolah SD, SMP dan SMA sebagai wujud niatan baik bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Sigi dalam memenuhi kepentingan dan tuntutan masyarakat. Tuntutan masyarakat, yaitu peningkatan kualitas masyarakat di Pedesaan sehingga dapat menunjang kualitas pembangunan daerah. Daya saing daerah dapat dilihat dari indicator kualitas dan kemampuan daya saing masyarakatnya. Peluang ini merupakan agenda koalisi antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi dalam membangun daerah kabupaten Sigi kini dan akan datang.

Pembangunan Kabupaten Sigi selama ini telah mengalami peningkatan yang signifikan. Pengalaman ini memberikan dampak lebih baik pada kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat. Hal ini karena income perkapita masyarakat semakin meningkat. Peningkatan kualitas ekonomi dan kualitas Sumber Daya Manusia merupakan koalisi antar DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi beberapa tahun terakhir dalam pembahasan anggaran politik APBD Kabupaten Sigi. Sebaelumnya Kabupaten Sigi saat masih bergabung dengan Kabupaten Donggala kualitas kesejahteraan masyarakat kita di sini kurang baik, karena kebijakan pembangunan dan program pembangunan lebih mengarah ke Pantai Barat. Setelah, Kabupaten Sigi berdiri sendiri, pembangunan telah berjalan secara pesat. Pembangunan baik fisik maupun mentalitas rakyat semakin baik. Hal ini menunjukkan tingkat etos kerja masyarakat semakin meningkat karena hasil kebun dan pertanian

dapat dipasarkan dengan muda. Bahkan, dengan penjualan yang cukup tinggi Pembangunan Kabupaten Sigi mengalami kemajuan signifikan membuat banyak investor masuk dan optimistis dalam menanamkan sahamnya. Kabupaten Sigi memang cukup potensial pengembangannya karena banyak lahan yang harus dibangun untuk kepentingan pelayanan publik

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian ini, dengan mempergunakan teori Thompson dan McEwen (2006), *Bargaining* (tawar menawar), Kooptasi (*cooptation*), dan Koalisi (*coalition*), dapat disimpulkan bahwa faktor bargaining program pembangunan sebagai hasil “reses” dan “musrembang” untuk dirumuskan menjadi kebijakan politik anggaran APBD tahun 2017 lalu cukup kurang berlangsung kurang baik yang memberikan dampak pada ketidak konsistensi program pembangunan yang telah menjadi aspirasi masyarakat. Bargaining program pembangun merupakan hal alternative dalam melahirkan solutif karena keterbatasan dana APBD saat itu. Kemudian faktor kooptasi dan koalisi bagian tak terpisahkan dari perumusan kebijakan politik Anggaran APBD 2017. DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi masing-masing telah menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Undang-undang. Hanya saja mengakomodasi berbagai saran dan aspirasi masyarakat menjadi kendala karena keterbatasan dana, dampaknya adalah kurang kepercayaan public terhadap Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Sigi.

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan kebijakan politik anggaran APBD tahun 2017 di Kabupaten Sigi yang memiliki peran penting adalah DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi, beberapa hal penting sebagai saran dalam penelitian ini yaitu Baik faktor *bargaining* maupu faktor koalisi dan kooptasi hendaknya lebih tingkatkan perannya, sehingga aspirasi dan saran masyarakat dapat terakomodasi sebagai hasil dari “reses” dan “

musrembang”. Kebijakan politik anggaran APBD 2017 hendaknya lebih ditingkatkan sosialisasinya sehingga rakyat memahami secara komprehensif. Keterbatasan dana APBD yang membuat ketidak terakomodasinya semua program pembangunan yang menjadi pokok saran dan aspirasi masyarakat. Memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme dan tahapan perumusan program pembangunan daerah yang menjadi hasil dari produk kebijakan politik anggaran APBD Kabupaten Sigi tahun 2017. Sinergitas antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi lebih ditingkatkan kualitasnya sehingga melahirkan kebijakan politik anggaran APBD dan lebih efektif dan tepat guna serta bermanfaat bagi masyarakat daerah Kabupaten Sigi.

DAFTAR RUJUKAN

- A.G. Subarsono. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Ade Putra (2017). Tesis “Implementasi kebijakan politik anggaran dalam pemilihan kepala daerah serentak di Provinsi Jambi”. Program Pascasarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung Bandar Lampung.
- Conyers, Diana. (1992). *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. (Penrejemah Susetawan), Gadjah Mada University Press.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.
- Eko, Sutoro. 2008. *Pro Poor Budgeting ; Politik Baru Reformasi Anggaran Daerah untuk Pengurangan Kemiskinan*, dalam IRE’S INSIGHT, Working Paper, IV, June. 2008. Yogyakarta: Institute For Research and Empowerment (IRE).
- Henry, Nicholas. 1988. *Administrasi Negara dan Masalah-Masalah Kenegaraan*, (terjemahan), Rajawali, Jakarta.

- Himpunan Produk Hukum DPRD Kabupaten Sigi, 2017
- Kartasasmita, Ginandjar. 1996. *Kebijakan dan Pembangunan Sosial*, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang.
- Madani Muhlis. 2011. *Dimensi Interaksi Aktor dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Marliyani (2015). Tesis. Politik Anggaran dalam Kebijakan Infrastruktur di Kabupaten Tanggamus Universitas Lampung.
- Miles B. Matthew and Huberman A. Michael. 1994. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (Second Edition). New Delhi: SAGE Publications.
- Moekijat, 1994. *Koordinasi: Suatu Tinjauan Teoritis*, Mandar Maju, Bandung.
- Nawawi H. dan Martini M. 2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Nugroho Riant, 2009. *Public Policy*, PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Nurcholis Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, PT Grasindo, Jakarta.
- Ridwan Saidi (2016). Tesis, “Kebijakan politik anggaran dalam perumusan kebijakan anggaran daerah kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan pada tahun anggaran 2016”, Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar.
- Soekanto, Soerjono.2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press
- Subarsono, 2009. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sugiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung
- Suharto, Edi (ed). 2004. *Isu – Isu Tematik Pembangunan Sosial Konsepsi dan Strategis*, Jakarta. Balatbangsos.
- Suharto, Edi. 2012. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Alfabeta, Bandung
- Tangkilisan Hessel Nogis. 2003. *Evaluasi Kebijakan Publik: Penjelasan, Analisis dan Transformasi Pikiran Nagel*, Balairung & Co, Yogyakarta.
- Ubaidi Suhardi. 2009. *Peran DPRD Kabupaten Sidoarjo Dalam Pengambilan Keputusan*”, Tesis, Pasca Sarjana, Universitas Air Langga, Surabaya
- Utomo Warsito.2011. *Dinamika Administrasi Publik: Analisis Empiris Seputar Isu-Isu Kontemporer Dalam Administrasi Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Wibawa Samoedra, Yuyun Purbokusumo, dan Agus Pramusindo, 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Wibawa, Samoedra, 2005. *Peluang Penerapan New Public Management Untuk Kabupaten di Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Winarno, Budi.2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Media Presindo.
- Yin. Robert K. 2002. *Studi Kasus: Desain dan Metode*, Rajawali Press, Jakarta